



Catatan Tahun 2025

Pers dalam

Pusaran Otoritarian



Catatan Tahun 2025

Pers dalam

Pusaran Otoritarian

Bab 1

Perubahan Politik Global dan Tekanan terhadap Media

Dalam dua tahun terakhir, lanskap politik global ditandai oleh menguatnya kekuatan populis dan otoritarian di berbagai kawasan, dari Eropa, Amerika Latin, hingga Asia. Sejumlah studi internasional tentang kebebasan sipil dan media menunjukkan tren yang konsisten: partai dan pemimpin yang berhaluan konservatif-kanan atau otoritarian memanfaatkan isu identitas, keamanan, dan “anti-hoaks” untuk membatasi kritik dan memobilisasi dukungan, sering kali dengan menjadikan jurnalis dan media independen sebagai musuh bersama.

Laporan-laporan global mengenai kebebasan pers mencatat penurunan skor di banyak negara, baik demokrasi mapan maupun negara transisi, akibat pelemahan institusi, polarisasi politik, serta serangan terhadap independensi media dan keselamatan jurnalis. Asia Tenggara tidak berada di luar arus ini: kudeta militer di Myanmar, pengetatan regulasi di Kamboja dan Vietnam, serta kriminalisasi kritik di Filipina dan negara lain menunjukkan bagaimana tren otoritarian global berkelindan dengan dinamika lokal untuk mempersempit ruang publik. Dalam konteks itulah situasi media dan jurnalis di Indonesia perlu dibaca: sebagai bagian dari gelombang kemunduran demokrasi global yang berdampak langsung pada keberlangsungan media dan keamanan jurnalis.

1. Krisis Stabilitas Media dan Nasib Pekerja

Sepanjang 2024–2025, ekosistem media di Indonesia dan Asia Tenggara ditandai oleh menurunnya stabilitas finansial dan operasional, yang paling terasa dampaknya pada pekerja media—khususnya jurnalis. Sejumlah kajian internasional soal media digital di Asia Tenggara menunjukkan bahwa model bisnis media yang bertumpu pada iklan dan platform digital menciptakan ketidakpastian tinggi: perubahan algoritma, penurunan belanja iklan, dan kompetisi dengan platform global membuat banyak ruang redaksi terpaksa melakukan efisiensi agresif, termasuk pemutusan hubungan kerja massal terhadap jurnalis dan pekerja pendukung.

Laporan dan analisis tentang industri media di Indonesia memperlihatkan pola serupa: perusahaan media besar—baik televisi, cetak, maupun online—melakukan rasionalisasi biaya, menggabungkan desk, mendorong multi-tasking ekstrem, dan mengontrak lebih banyak pekerja lepas tanpa perlindungan memadai. Dalam beberapa kasus, pemecatan dilakukan tanpa keterlibatan serikat, kompensasi layak, atau transparansi alasan manajerial, sehingga jurnalis menanggung beban ganda: ketidakpastian kerja sekaligus tekanan produktivitas di tengah kondisi industri yang rapuh.

2. Menyusutnya Ruang Publik: Global, Kawasan, Indonesia

Kondisi media tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas. Secara global, terjadi tren kemunduran demokrasi dan naiknya kekuatan politik yang otoritarian atau populis kanan, yang memandang jurnalisme kritis sebagai ancaman dan menggunakan retorika “musuh rakyat” atau “media tidak netral” untuk mendelegitimasi liputan independen. Berbagai studi tentang kebebasan pers di Asia Tenggara menegaskan bahwa banyak negara di kawasan ini—dari Myanmar, Filipina, hingga Kamboja—mengalami penurunan signifikan dalam indeks kebebasan pers, seiring penggunaan UU keamanan nasional dan regulasi daring untuk membatasi kritik, menutup media independen, dan mengkriminalkan jurnalis.

Indonesia, yang dulu sering dipandang sebagai “pionir reformasi pers” pasca 1998, kini berada di persimpangan. Kajian tentang politik digital dan media control di Indonesia menggambarkan menguatnya apa yang disebut sebagai “authoritarian statism”: konsolidasi kekuasaan eksekutif, kedekatan elite politik dengan pemilik media, serta penggunaan perangkat hukum dan regulasi digital untuk menekan kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers. Ruang publik menyempit ketika jurnalis, aktivis, dan warga yang menyuarakan kritik dihadapkan pada risiko pelaporan, kriminalisasi, atau serangan balik terkoordinasi, sehingga self-censorship makin meluas.

3. Ancaman Terhadap Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis

Di level praksis, kemunduran politik dan menyusutnya ruang publik diterjemahkan dalam peningkatan risiko terhadap jurnalis. Laporan indeks keselamatan jurnalis di Indonesia menunjukkan bahwa, meski secara formal ada kerangka hukum yang mengakui kemerdekaan pers, dalam praktiknya jurnalis masih menghadapi kekerasan fisik, intimidasi, pelarangan liputan, perusakan dan perampasan alat kerja, hingga serangan digital yang sistematis. Penelitian hukum dan jurnalisme menyoroti bahwa instrumen seperti KUHP baru dan UU ITE kerap digunakan—atau setidaknya diancamkan—untuk menjerat jurnalis dan media yang melakukan liputan kritis, terutama mengenai korupsi, konflik agraria, dan isu identitas.

Kajian regional tentang kebebasan pers di Asia Tenggara menegaskan bahwa kriminalisasi jurnalisme sering dibungkus dengan narasi “anti-hoaks”, “keamanan nasional”, atau “perlindungan moral publik”. Ini menciptakan iklim ketakutan yang menggerus salah satu fungsi utama pers: mengawasi kekuasaan dan menjadi ruang deliberasi publik. Ancaman terhadap jurnalis tidak lagi hanya berbentuk kekerasan fisik di lapangan, tetapi juga serangan daring, doxing, kampanye pembunuhan karakter, dan gugatan hukum yang melelahkan secara finansial dan psikologis.

Kabar buruk juga datang dari Dewan Pers. Anggaran dari negara untuk Dewan Pers tahun 2026 dibabat tuntas dengan alasan efisiensi. Efisiensi ini mengada-ada, karena Presiden Prabowo justru menggemukkan kabinet yang jelas memakan anggaran. Dewan Pers dengan anggaran yang minim, pada tahun 2026 terancam lumpuh dan tidak bisa menjalankan fungsinya: penyelesaian aduan dari masyarakat, mengawasi jalannya kode etik jurnalistik dan mengawal kebebasan pers.

4. Dimensi Teknologi: Antara Peluang, Krisis Bisnis, dan Kontrol

Transformasi digital yang awalnya dijanjikan sebagai peluang demokratisasi informasi ternyata membawa paradoks. Studi tentang media digital di Asia Tenggara menunjukkan bahwa ketergantungan pada platform global (Google, Meta, TikTok, dan lainnya) membuat keberlangsungan media sangat bergantung pada algoritma dan kebijakan monetisasi yang tidak transparan. Ketika algoritma berubah atau insentif iklan bergeser, traffic media bisa turun drastis, memaksa ruang redaksi mengejar klik dengan konten cepat, mengurangi ruang untuk liputan investigatif, dan pada akhirnya mendorong pengurangan jumlah jurnalis.

Transformasi digital yang awalnya dijanjikan sebagai peluang demokratisasi informasi ternyata membawa paradoks. Studi tentang media digital di Asia Tenggara menunjukkan bahwa ketergantungan pada platform global (Google, Meta, TikTok, dan lainnya) membuat keberlangsungan media sangat bergantung pada algoritma dan kebijakan monetisasi yang tidak transparan. Ketika algoritma berubah atau insentif iklan bergeser, traffic media bisa turun drastis, memaksa ruang redaksi mengejar klik dengan konten cepat, mengurangi ruang untuk liputan investigatif, dan pada akhirnya mendorong pengurangan jumlah jurnalis.

Di sisi lain, penelitian tentang kontrol media dan politik digital di Indonesia dan kawasan menyoroti bagaimana teknologi juga menjadi infrastruktur baru untuk pengawasan dan represi. Regulasi konten online yang luas dan multitafsir, kewajiban pemblokiran konten, serta praktik surveillance dan serangan siber membuat jurnalis dan media hidup dalam ancaman permanen. Serangan bot, peretasan akun, dan penyebaran disinformasi yang menasar jurnalis kritis menjadi bagian dari ekosistem yang secara sistematis melemahkan jurnalisme independen dan merusak kepercayaan publik terhadap media.

Bab 2

Eskalasi Kekerasan Dan Upaya Pembungkaman Pers

Tahun 2025 menjadi babak penuh paradoks bagi kemerdekaan pers di Indonesia. Di satu sisi, jurnalisme terus membuktikan perannya sebagai benteng terakhir penjaga akal sehat publik di tengah badai disinformasi. Di sisi lain, para penjaga pilar keempat demokrasi ini harus bekerja di bawah tekanan dan ancaman yang semakin nyata, dari ruang redaksi hingga ke jalanan. Kekerasan fisik, serangan digital, intimidasi aparat, hingga gugatan hukum menjadi momok yang menguji nyali dan integritas jurnalis. AJI Indonesia mencatat ada 89 kasus berbagai kekerasan pada jurnalis di tahun 2025.

Intervensi dan intimidasi pada ruang redaksi meningkat dan cenderung menjadi normalisasi. Dari beberapa pengakuan tertutup, para redaktur menceritakan ruang redaksinya sering mendapatkan telepon atau pesan dari lingkaran kekuasaan. Pesan dari lingkaran kekuasaan itu adalah tuntutan untuk menghapus berita atau tidak memberitakan isu tertentu.

Di sisi lain, tindak kekerasan fisik pada jurnalis di lapangan juga meningkat. Impunitas atau tidak ada proses hukum pada pelaku kekerasan pada jurnalis, justru membuat kasus kekerasan terus berulang. AJI mencatat sepanjang tahun 2025, pelaku kekerasan fisik pada jurnalis adalah aparat kepolisian sebanyak 21 kasus. Kasus kekerasan terutama terjadi pada saat demonstrasi, aparat kepolisian mempertontonkan kekerasan pada peserta demonstrasi maupun pekerja yang sedang bertugas seperti tenaga medis maupun jurnalis.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat sebanyak 89 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis dan media sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari 89 luka pada kemerdekaan pers.

Serangan ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, dengan tiga kategori utama mendominasi:

- Kekerasan Fisik: menjadi yang tertinggi dengan 30 kasus.
- Serangan Digital: di posisi kedua dengan 29 kasus, menunjukkan pergeseran bentuk ancaman ke ruang siber.
- Teror dan Intimidasi: tercatat sebanyak 22 kasus, menciptakan iklim ketakutan yang sistematis.

Selain itu, bentuk serangan lain yang turut mewarnai tahun ini adalah pelarangan liputan, perusakan alat kerja, penghapusan data jurnalistik, gugatan hukum yang melemahkan (SLAPP), hingga praktik swasensor akibat tekanan eksternal.

Dari sisi pelaku, ironi terbesar kembali terungkap. Aparat Kepolisian menjadi pelaku kekerasan yang paling banyak teridentifikasi, dengan total 21 kasus. Diikuti oleh aparat TNI dengan 6 kasus. Namun, angka tertinggi justru datang dari pelaku tak dikenal 29 kasus, yang mayoritas terkait dengan serangan digital dan teror. Hal ini mengindikasikan bahwa para penyerang kini semakin lihai bersembunyi di balik anonimitas.

Ancaman ini tidak terpusat di Jakarta semata, melainkan menyebar di berbagai daerah, dari Sorong, Ambon, Kendari, Makassar, hingga Lombok, Medan, Aceh, dan Bali. Ini membuktikan bahwa keselamatan jurnalis adalah isu nasional yang mendesak.

A. Prahara Agustus 2025

Puncak eskalasi kekerasan terjadi selama gelombang unjuk rasa besar pada akhir Agustus 2025. Saat ribuan mahasiswa, buruh, dan warga sipil turun ke jalan untuk menyuarakan protes terhadap kebijakan pemerintah, jurnalis yang meliput justru menjadi sasaran di tengah bentrokan. AJI mencatat sedikitnya 8 kasus kekerasan terjadi hanya dalam periode aksi tersebut.

Di Jakarta, unjuk rasa di depan Gedung DPR pada 28 Agustus berujung ricuh. Bentrokan meluas hingga ke jalan tol dan jalur kereta api. Tragedi memilukan terjadi ketika sebuah kendaraan lapis baja polisi menabrak dan menewaskan seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan. Insiden yang terekam video ini memicu kemarahan massa lebih lanjut.

Di tengah situasi inilah, jurnalis yang berusaha mendokumentasikan fakta mengalami intimidasi, perampasan alat, dan kekerasan fisik dari aparat. Pola serupa terjadi di Medan, Surabaya, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan kota-kota lainnya, di mana jurnalis yang merekam brutalitas aparat justru menjadi target.

B. Kasus Menonjol Serangan pada Pers

Di tengah gelombang serangan, AJI bersama Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) dan LBH Pers terus melakukan advokasi. Beberapa kasus menonjol menjadi penanda pentingnya perlawanan dan solidaritas.

Kriminalisasi Lewat Jalur Perdata: Gugatan Menteri Pertanian terhadap Tempo

Menteri Pertanian Amran Sulaiman melayangkan gugatan perdata senilai Rp200 miliar terhadap Tempo akibat poster berita edisi 16 Mei 2025. Gugatan ini tetap dilayangkan meskipun Tempo telah menjalankan seluruh rekomendasi Dewan Pers, termasuk mengganti judul poster dan meminta maaf. Langkah ini jelas merupakan upaya pembungkaman pers melalui jalur hukum.

Melalui advokasi yang kuat, termasuk aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim pada 17 November 2025 akhirnya mengabulkan eksepsi Tempo dan menolak gugatan tersebut. Kemenangan ini menjadi preseden penting bahwa sengketa pers harus diselesaikan melalui mekanisme UU Pers, bukan pengadilan umum. Meski demikian, perjuangan belum usai, karena pihak Menteri Amran Sulaiman sedang mengajukan banding dan proses hukum sedang berlangsung.

Tebang Pilih Proses Hukum Tewasnya Jurnalis di Karo

Kasus sangat tragis, yang terjadi pada tahun 2024. Rumah seorang jurnalis Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dibakar orang pada 27 Juni 2024. Pembakaran ini menewaskan Rico beserta istri, anak, dan cucunya.

Investigasi AJI dan KKJ menemukan fakta kuat bahwa peristiwa ini terjadi setelah korban gencar memberitakan praktik perjudian ilegal di wilayah tersebut. Kasus ini menjadi pengingat paling kelam bahwa kerja jurnalistik di Indonesia masih bertarung dengan nyawa.

Lewat berbagai tekanan publik, polisi mengungkap dan menangkap tiga pelaku yang menjadi eksekutor pembakaran. Para pelaku kemudian diadili dan divonis oleh pengadilan pada tahun 2025. Mereka adalah Bebas Ginting alias Bulang (62) dan Yunus Syahputra Tanjung (37) dijatuhi vonis seumur hidup, dan Rudi Apri Sembiring (37) divonis 20 tahun penjara oleh

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe, Kamis, 27 Maret 2025. Mereka pun mengajukan banding, namun putusan hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menjatuhkan ketiganya hukuman seumur hidup.

Keadilan belum ditegakkan, karena otak dari pembunuhan ini belum tertangkap. Investigasi AJI dan KKJ Sumatera Utara menyimpulkan dugaan kuat otak pembunuhan ini adalah anggota TNI AD yang berinisial HB dan sudah dilaporkan ke Polisi Militer (Pomdam I/Bukit Barisan. Nama anggota TNI AD ini juga disebut oleh para saksi di pengadilan bahwa memiliki kedekatan dengan Bulang. Namun proses hukum menggantung, tidak ada kelanjutannya.

Teror kepada Jurnalis Tempo

Pada 19 Maret 2025, kantor redaksi Tempo menerima paket berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh kurir yang memakai atribut aplikasi pengiriman barang. Paket ditujukan untuk Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host sinar Bocor Alus Politik.

Pada 21 Maret, Setri Yasra, pemimpin redaksi TEMPO mendatangi Markas Besar Polri untuk melaporkan paket tersebut dan menjadi barang bukti. Sehari setelahnya, (22/03), di area parkir Tempo terdapat sebuah kardus mencurigakan. Setelah diperiksa, ternyata ada enam bangkai tikus dengan kepala terpenggal yang disusun secara rapi.

Meski Mabes Polri mengklaim membentuk tim untuk mengusut peneror dan mencari tahu motifnya, hingga kini kasus tersebut belum juga terungkap.

Intimidasi Berulang oleh Anggota TNI

Sepanjang 2025, arogansi aparat berseragam menjadi pola yang terus berulang. Dua kasus di Aceh menunjukkan betapa rentannya jurnalis di hadapan aparat yang anti-kritik.

- Kasus Davi Abdullah (Kompas TV Aceh): Saat meliput penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda pada 11 Desember, Davi diintimidasi oleh Aster Kasdam IM, Kolonel Inf Fransisco. Ponselnya dirampas dan dua file video liputan dihapus paksa, disertai ancaman dan makian bahwa Lanud adalah "wilayah kekuasaannya".
- Kasus Muhammad Fazil (AJI Lhokseumawe): Saat meliput aksi damai di Aceh Utara pada 25 Desember, Fazil yang merekam dugaan kekerasan aparat didatangi oleh oknum TNI, Praka Junaidi. Ponselnya dirampas secara paksa hingga rusak, disertai ancaman akan melempar perangkat tersebut.

Kedua insiden ini adalah bukti nyata penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakpahaman aparat terhadap UU Pers. Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan tindak pidana penghalangan kerja jurnalistik.

Darurat Pembungkaman di Tengah Bencana

Salah satu tren paling mengkhawatirkan di penghujung tahun adalah upaya pembatasan informasi secara sistematis terkait liputan bencana di Sumatera. Ketika publik sangat membutuhkan informasi yang akurat, negara justru diduga aktif melakukan intervensi. Polanya jelas: intimidasi terhadap jurnalis yang meliput bantuan internasional, penghapusan berita di media besar, hingga penghentian siaran langsung dari lokasi bencana.

Tindakan ini adalah pelanggaran berlapis:

- Melanggar Kebebasan Pers (Pasal 8 dan 18 UU Pers): Menghalangi jurnalis melaporkan fakta.
- Melanggar Hak Publik Atas Informasi (Pasal 28F UUD 1945):
- Membahayakan keselamatan publik dengan menyembunyikan kondisi riil.
- Menjadikan Negara Produsen Disinformasi: Ketika laporan faktual dibungkam, narasi tunggal pejabat yang berpotensi keliru dibiarkan hadir tanpa koreksi.

C. Membangun Benteng Perlindungan di Daerah

Di tengah meningkatnya ancaman, perjuangan melindungi jurnalis tidak bisa lagi hanya berpusat di ibu kota. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi AJI Indonesia untuk memperkuat fondasi perlindungan di tingkat lokal. Melalui Program Jurnalisme Aman yang didukung oleh Yayasan Tifa, AJI bersama Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) secara aktif mendorong lahirnya benteng-benteng pertahanan baru di daerah-daerah yang rawan kekerasan.

Upaya ini bukan sekadar pelatihan, melainkan sebuah gerakan terintegrasi untuk membangun resiliensi, menyamakan persepsi, dan merumuskan strategi advokasi bersama. Fokusnya adalah pada keselamatan holistik yang mencakup keamanan fisik, psikososial, dan digital.

Pembentukan KKJ Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, menjadi salah satu fokus utama pengorganisasian tahun ini. Kekerasan terhadap jurnalis di wilayah ini telah menjadi ancaman nyata yang polanya terus berulang.

Laporan Divisi Advokasi AJI Palu menunjukkan bahwa intimidasi, teror, hingga pelarangan liputan seolah mendapat legitimasi karena pelakunya sering kali adalah oknum aparat negara seperti polisi, tentara, dan Satpol PP.

Menjawab tantangan tersebut, AJI Palu bersama KKJ menggelar serangkaian kegiatan di Kota Palu, meliputi Pelatihan Keselamatan Holistik, Focus Group Discussion (FGD), hingga puncaknya adalah peluncuran Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tengah.

KKJ Sulawesi Tengah resmi terbentuk atas prakarsa bersama AJI, PWI, IJTI, AMSI, dan PFI, serta melibatkan advokat dari Jatim Sulteng, LBH-APIK, dan LPS HAM.

Deklarasi KKJ Sulawesi Tenggara

Alarm bahaya juga berbunyi nyaring dari Sulawesi Tenggara. Data Bidang Advokasi AJI Indonesia menunjukkan bahwa Sultra menjadi wilayah dengan kasus kekerasan terhadap jurnalis tertinggi di Kawasan Sulawesi dalam tiga tahun terakhir.

Menyikapi darurat keselamatan ini, AJI Kendari bersama KKJ menggelar kegiatan serupa di Kota Kendari pada 24–25 Oktober 2025, yang diakhiri dengan deklarasi Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara. Deklarasi ini didukung oleh program Jurnalisme Aman dari Yayasan Tifa. Keanggotaan KKJ Sultra ini terdiri dari; AJI Kendari, IJTI Sultra, AMSI Sultra, PusPAHAM Sultra, dan jaringan Advokat Sultra.

D. Serangan Digital Meningkat

Bidang Advokasi dan Bidang Internet AJI Indonesia mencatat insiden atau serangan digital pada hingga Desember 2025 sebagai yang tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Jumlah insiden atau serangan itu mencapai 29 kasus.

Tabel 1. Jumlah kasus dan laporan serangan berbasis digital kepada jurnalis dan media

Tahun	Jumlah kasus/laporan	Jenis serangan	Catatan
2020	7 kasus	Doxing, DDOS	
2021	5 kasus	DDOS, Peretasan	
2022	15 kasus	Peretasan, DDOS, Pelaporan pelanggaran ketentuan komunitas	-Pencatatan kasus peretasan awak dan mantan redaksi Narasi ini mencakup 37 orang namun digabung jadi 1 kasus.
2023	16 kasus	Peretasan, DDOS, Defacement Web Berita, Pengambilalihan akun medsos+WA, Suspend Web Media/Berita, Suspend Akun Medsos, Doxing	
2024	10 kasus	Pembekuan/suspend akun media sosial oleh platform, peretasan email, peretasan WA, doxing, phishing	
2025	29 kasus	Pembekuan/suspend akun media sosial oleh platform, peretasan, doxing, DDoS, impersonasi, ransomware, order fiktif	Jumlah insiden/serangan digital tertinggi dalam rentang waktu 12 tahun terakhir.

Beragam serangan berbasis digital yang tercatat pada 2025 memperlihatkan masih rawannya kerja-kerja jurnalistik.

Jenis serangan yang dominan pada 2025 adalah DDoS (Distributed Denial of Services) pada media online yang mengakibatkan pengelola media tidak dapat mengakses CMS dan publik tidak dapat mengakses informasi dari media yang kena serangan.

Serangan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah pembekuan akun media sosial milik media oleh platform. Serangan seperti ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan pemberitaan media dengan cara mengirimkan laporan pelanggaran ketentuan komunitas ke platform digital.

Salah satu jenis serangan baru adalah munculnya pesanan atau order fiktif pada dua kantor media di Batam dan Tanjungpinang. Serangan berupa order fiktif ini tidak hanya merugikan media yang dituju, tapi juga para pengemudi ojek daring.

Serangan Digital pada Jurnalis

Khusus terhadap jurnalis, AJI mencatat sedikitnya ada 7 (tujuh) jurnalis jadi korban serangan digital selama tahun 2025.

Serangan itu, masing-masing:

1. Impersonasi jurnalis di platform Facebook yang narasinya menyatakan jurnalis itu meminta sejumlah uang dalam konteks pemberitaan tambang emas ilegal di Gorontalo (2 jurnalis)
2. Doxxing terhadap jurnalis Tempo yang juga host podcast Bocor Alus serangkaian dengan kasus teror kepala babi ke kantor Tempo
3. Doxxing juga terjadi pada jurnalis yang meliput sengketa tata ruang di Bandung
4. Doxxing pada jurnalis pemeriksa fakta terkait konten debunking perihal vaksin Covid-19
5. Doxxing pada anggota AJI Kota Semarang yang dikaitkan dengan framing tuduhan sebagai provokator dalam aksi massa di Salatiga
6. Peretasan akun Whatsapp Pemimpin Redaksi Konde.co yang dampaknya akun tersebut menyebarkan file berbasis .apk

Bidang Internet AJI mengumpulkan dan memberikan paparan singkat terkait kasus-kasus serangan digital sepanjang 2025 dalam dokumen terpisah. Dokumentasi ini memperlihatkan adanya serangan DDoS pada 5 (lima) portal media, upaya pengambilalihan CMS portal satu media. Tautan untuk melihat rinci dokumentasi ini: <https://bit.ly/serangandigital2025>

Jenis serangan digital itu terbanyak adalah pengambilalihan akun media sosial dan CMS (6 kasus), suspend atau penangguhan akun media sosial oleh platform (4 kasus), doxing (4 kasus), impersonifikasi (2 kasus).

Mitigasi dan Kolaborasi

Peningkatan level mitigasi serangan digital tahun ini dilakukan dengan upaya melakukan pemetaan risiko keamanan personal dan kelembagaan serta melakukan pembaharuan advokasi dan penanganan kasus berbasis simulasi.

Hasil riset terakhir AJI bersama IMS dan PR2Media merekomendasikan perlunya SOP keamanan dan audit keamanan digital bagi perusahaan pers, jurnalis untuk meningkatkan mitigasi, mengurangi dampak buruk serangan baik fisik, hukum, dan psikososial.

AJI Indonesia tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRACE), kolektif individu dan organisasi di bidang keamanan digital. Peranan koalisi ini memberikan pendampingan terhadap kelompok berisiko tinggi, termasuk jurnalis, aktivis, media, organisasi masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia.

Bidang Internet AJI Indonesia juga berpartisipasi dalam penyusunan Panduan Audit Keamanan Digital Perusahaan Media bersama SAFEnet. Bidang Internet AJI juga berkolaborasi dengan Koalisi Bocor Data terkait kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) bersama SAFEnet, LBH Pers, dan jaringan advokat publik untuk melakukan gugatan kepada negara. Saat ini proses persidangan masih pada tahap pemeriksaan awal di pengadilan.

Dalam isu moderasi konten, AJI bergabung dalam Koalisi Damai yang beranggotakan 16 organisasi masyarakat sipil (OMS). Koalisi ini sepanjang tahun 2025 aktif memberikan masukan dan kritis pada beberapa regulasi konten baik itu di Pemerintah maupun Platform Digital.

E. Kebebasan Pers di Regional

AJI memandang bahwa pembelaan terhadap kebebasan pers dan perlindungan jurnalis tidak lagi dapat dilakukan secara eksklusif di level nasional. Tantangan yang dihadapi jurnalis Indonesia—dari krisis model bisnis media, tekanan politik, hingga represi digital—menggema di banyak negara lain di Asia Tenggara dan dunia, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian internasional tentang media, kebebasan pers, dan keselamatan jurnalis.

Bidang Hubungan Internasional dan Antar Lembaga AJI Indonesia melakukan ekspansi kolaborasi, meluaskan pengaruh, dan memperkuat komunikasi dengan organisasi profesi di kawasan serta lembaga-lembaga yang mempromosikan kebebasan berpendapat, perlindungan jurnalis, dan keberlangsungan media. Upaya ini mencakup pembangunan jaringan solidaritas, pertukaran pengetahuan, advokasi bersama, dan program kolaboratif lintas negara yang bertujuan memastikan bahwa jurnalis tidak sendirian menghadapi tekanan, dan bahwa kebebasan pers tetap dipertahankan sebagai pilar utama demokrasi—di Indonesia, di Asia Tenggara, dan di dunia.

AJI Indonesia melakukan penguatan komunikasi dan jaringan organisasi di Asia Tenggara lewat PFMSea (Press Freedom Monitoring South East Asia). PFMSea yang dideklarasikan di Pnom Penh, Cambodia, telah memiliki jaringan di enam negara Asia Tenggara. Jejaring ini memperjuangkan kebebasan pers yang ‘tidak baik-baik saja’ di negara-negara tersebut. Dari data yang ada, kasus kekerasan pada jurnalis di Asia Tenggara dalam kurun 2022–2025, banyak dilaporkan terjadi di Kamboja, Filipina dan Indonesia. Meski tidak menutup kemungkinan banyak juga terjadi di Myanmar, Vietnam, Laos namun tidak bisa dilaporkan.

AJI Indonesia lewat Bidang Hubungan Internasional dan Antar Lembaga berhasil memperjuangkan Nany Afrida (Ketua Umum AJI Indonesia) untuk menjadi Presiden International Federation of Journalist (IFJ) kawasan Asia Pasifik periode 2025–2028. IFJ sendiri adalah organisasi jurnalis yang bermarkas besar di Brussels, Belgia. Dengan terpilihnya Presiden IFJ Asia Pasific, diharapkan suara dari Indonesia tentang kebebasan pers dan serikat pekerja jurnalis akan lebih lantang.

Bab 3

Gelombang PHK Tanpa Negara Hadir

Kondisi hubungan industrial pekerja media selama tahun 2025 masih suram seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan sebagai tahun kelim dengan semakin banyaknya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kondisi hubungan industrial yang menimbulkan perselisihan menjadi persoalan laten yang tak kunjung usai, justru sebaliknya, korban terus bertambah. Perusahaan media yang selama ini sebagai kontrol sistem dan produknya bagian dari pilar demokrasi, justru sebaliknya memberlakukan pekerjanya secara sewenang-wenang.

Seperti tahun tahun sebelumnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak juga hak-hak normatif tak dipenuhi. Perusahaan justru menggunakan cara-cara intimidatif menghadapi pekerja yang memperjuangkan haknya.

Bahkan catatan AJI Indonesia menemukan total korban kasus PHK sejak tahun 2024 hingga 2025 terus bertambah dengan jumlah mencapai 922 orang. Detailnya tahun 2024 sebanyak 373 orang, tahun 2025 sebanyak 549 orang.

Sebagian kasus pelanggaran hubungan industrial perusahaan media termasuk PHK sepihak dilaporkan langsung ke Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia. Para pekerja dapat melaporkan kasusnya lewat tautan berikut: <https://advokasi.aji.or.id/kasus-ketenagakerjaan-jurnalis>

Tabel 1: Data Kasus PHK/Sengketa Ketenagakerjaan tahun 2024

No	Nama Pekerja (Media)	Jumlah yang di PHK dalam Angka	Status Kerja (PKWT,PKWTT, Outsourcing,dll)	Nama Perusahaan	Waktu PHK
1	CNN Indonesia	80	N/A	PT Trans News Corp	Februari 2024
2	Gatra	102*	PKWTT	PT Era Media Informasi	Juli 2024
3	CNN Indonesia	20	PKWTT	PT Trans News Corp	Agustus 2024
4	Jawa Pos	1	PKWT	Jawa Pos	Agustus 2024
5	Tribun Lampung	3	PKWT	Tribun Lampung	Agustus 2024
6	ANTV	57	N/A	PT Cakrawala Andalas Televisi	Desember 2024
7	Metro TV	50	PKWTT	Metro TV	2024
8	Republika	60	N/A	PT Republika Media Mandiri	Mei 2024
Total yang di PHK dalam Angka: 373 orang					

Catatan: untuk yang memiliki tanda (* adalah total jumlah dari yang ada di daerah dan nasional

Tabel 2: Data Kasus PHK/Sengketa Ketenagakerjaan tahun 2025

No	Nama Pekerja (Media)	Jumlah yang di PHK dalam Angka	Status Kerja (PKWT,PKWTT, Outsourcing,dll)	Nama Perusahaan	Waktu PHK
1	Detik.com	100	PKWTT	Detik.com	Maret 2025
2	Jawa Pos	21*	PKWTT	Jawa Pos	Maret 2025
3	INews Biro Semarang	11	PKWTT	MNC Group	Mei 2025
4	Kompas TV	150	N/A	Kompas TV	Mei 2025
5	MNC Group (termasuk Biro Semarang)	99	N/A	MNC Group	Mei 2025
6	Pontianak Pos	20	PKWTT	Pontianak Pos	Mei 2025
7	Jawa Pos	2	PKWTT	Jawa Pos	Juni 2025
8	RTV	45	PKWTT	RTV	Juni 2025
9	CNN Indonesia	10	N/A	PT Trans News Corp	Juli 2025
10	Inilah.com	20	N/A	PT Indonesian News Center	Juli 2025
11	TV One	15	PKWTT	TV One	Juli 2025
12	Liputan6	56*	N/A	Liputan 6	2025
Total yang di PHK dalam Angka: 549 orang					

Catatan: untuk yang memiliki tanda (* adalah total jumlah dari yang ada di daerah dan nasional

Berikut beberapa kasus ketenagakerjaan yang menonjol:

1. Radar Selatan (Bengkulu)

Kasus bermula dari Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 tidak dibayar utuh. Kemudian disusul dengan pemotongan gaji pekerja secara sepihak. Manajemen beralasan kondisi keuangan perusahaan tidak sedang baik.

Ketika para pekerja mulai mempertanyakan, terkuak bahwa perusahaan juga menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, terakhir dibayar pada Januari 2025. Dan diam-diam perusahaan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan pekerja sudah mengundurkan diri, padahal para pekerja tetap dituntut bekerja membuat berita. Saat dikonfirmasi pekerja, alasan manajemen mencairkan BPJS untuk membayar gaji pekerja.

2. BatamTV (Batam)

Kasusnya tentang gaji yang tidak utuh diterima pekerja. Sejak Januari 2025, gaji pekerja selalu diangsur. Keterlambatan terus terjadi pada bulan-bulan berikutnya, sampai kemudian pada Juli 2025, sebanyak 9 pekerja melayangkan surat untuk mempertanyakan soal keterlambatan dan angsuran gaji.

Alih-alih ditemui oleh manajemen, justru ke-9 pekerja tersebut mendapat ancaman di-PHK atau tidak diperpanjang kontraknya. Akhirnya sebagian pekerja membawa kasus ini ke tahapan perselisihan hubungan industrial. Tahapan bipartit tidak menemukan titik temu, dan sampai akhir Desember 2025, kasus ini masuk tahap tripartit, yaitu antara pekerja, perusahaan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam.

3. Suara.com (Jakarta dan Yogyakarta)

Pada Februari 2025 manajemen Suara.com mengumumkan efisiensi di segala lini karena keuangan perusahaan mengalami penurunan usai ditetapkannya kebijakan efisiensi pemerintah. Efisiensi yang diberlakukan yakni karyawan shift 1 yang biasanya masuk pukul 07.00 diminta untuk WFH mulai pukul 06.00 dan baru datang ke kantor pukul 09.00–15.00 WIB dan meniadakan shift keempat 15.00–00. Selain itu, perusahaan menetapkan kebijakan reimburse kesehatan hanya bisa diklaim 70% (sebelumnya reimburse kesehatan yang diklaim 100% dari nota).

Pada Maret 2025, manajemen menggelar rapat pengumuman potongan gaji untuk seluruh karyawan. Inti pengumuman keuangan perusahaan mengalami turbulensi imbas efisiensi pemerintahan. Maka dilakukan pemotongan gaji dan pemotongan biaya perjalanan dinas. Untuk pemotongan gaji dimulai dari 5 hingga 30% sesuai hasil kinerja tiap karyawan selama tiga bulan.

4. Suara Merdeka (Semarang)

Lima pekerja media Suara Merdeka di Semarang mengadukan pemotongan upah sejak sejak 2013 lalu. Puncaknya saat pandemi Covid 2020–2023, gaji dipotong sebanyak 45 persen dan tidak dikembalikan hingga sekarang. Bahkan, upah yang sudah dipotong tersebut masih dicicil tanpa ketentuan waktu. Dalam sebulan, cicilan itu hanya diberikan sejumlah Rp200 ribu dari gaji Rp2 juta (setelah dipotong).

Dalam satu minggu, mereka hanya dipekerjakan dua hari atau dua kali kerja saja, karena alasan perusahaan tidak ada uang.

5. PosKota (Jakarta)

Pada tanggal 21 Mei 2025, secara tiba-tiba pekerja jurnalis mendapat surat pemberhentian kerja (layoff) melalui chat WhatsApp dari nomor staf HRGA Poskota. PHK itu sepihak karena tidak adanya pemberitahuan terlebih dulu dan dilakukan hanya H-10 sebelum pemberhentian kerja.

Gaji bulan terakhir pekerja korban PHK belum dibayar penuh, hanya setengah dari jumlah yang seharusnya.

6. Kompas.com (Karanganyar)

Pekerja PT Kompas Cyber Media atau Kompas.com yang bekerja di kantor cabang di Klodran, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah umumnya melakukan kerja layaknya kreator konten. Tidak turun lapangan, namun mengolah dari bahan-bahan yang ada di internet. Sebagian dari mereka berstatus kontrak, atau disebut kontrak profesional (konpro).

Mereka yang berstatus konpro ini dibayar di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karanganyar pada 2025 yakni Rp2.437.110, sementara pekerja menerima take home pay (THP) sebesar Rp2.400.000. Kemudian hak-hak dasar pekerja tidak diberikan seperti uang kompensasi (bagi pekerja kontrak), cuti tahunan, cuti hamil, cuti menikah, atau cuti haid. Konpro juga tidak mendapat THR dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Para pekerja Konpro sempat menyampaikan keluhan kepada perusahaan mengenai cuti. Akhirnya konpro mendapat jatah cuti 6 hari dalam 12 bulan. Namun cuti lainnya seperti cuti hamil, tidak diberikan.

7. Kemenangan Pekerja CNN Indonesia

Di tahun 2025, pekerja CNN Indonesia yang tergabung dalam serikat pekerja SPCI (Solidaritas Pekerja CNN Indonesia) mendapatkan kemenangan hukum dalam kasus hubungan industrial dengan pihak manajemen.

Para pekerja menggugat di dua lokasi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yaitu Jakarta dan Surabaya. Dan pada pertengahan tahun 2025, keluar keputusan PHI Jakarta (pemotongan upah dan PHK) dan keputusan PHI Surabaya (pemotongan upah dan PHK) memenangkan gugatan SPCI.

Pihak manajemen CNN Indonesia mengajukan kasasi. Dan pada bulan Agustus 2025, kasasi keputusan pemotongan upah di Surabaya ditolak oleh Mahkamah Agung. Kemudian pada awal Desember 2025, kasasi kasus pemotongan upah dan PHK, juga ditolak oleh Mahkamah Agung dan menguatkan Keputusan PHI. Pihak manajemen CNN Indonesia harus membayar sisa upah yang dipotong dan pesangon para pekerja yang tergabung SPCI.

Kasus ini dilatarbelakangi pemotongan upah sepihak oleh manajemen CNN Indonesia pada awal tahun 2024. Sebagian pekerja CNN Indonesia mempertanyakan pemotongan upah dan mendirikan serikat pekerja atau SPCI (Solidaritas Pekerja CNN Indonesia) pada Agustus 2024. Para pekerja yang tergabung di SPCI kemudian di-PHK sepihak. Tindakan ini disebut union busting atau pemberangusan serikat pekerja. Maka para pekerja SPCI menggugat ke PHI.

Bab 4

Pelanggaran Etik dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Media

Bidang Pendidikan, Etik, dan Profesi AJI Indonesia mencatat masalah klise pelanggaran etik jurnalistik masih menjadi isu serius sepanjang tahun 2025. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penyakit pers berupa swasensor dan ambruknya pagar api antara redaksi dan bisnis masih kuat mencoreng wajah jurnalisme.

Sejumlah media memiliki kedekatan bisnis atau mendapat iklan yang cukup besar dengan beberapa perusahaan perusak lingkungan. Demi iklan, kemudian pagar api diabaikan, sehingga berita-berita kritis pada perusahaan pun hilang.

Ada juga media yang terang-terangan tunduk terhadap kekuasaan. Ada kebijakan redaksi untuk menghindari liputan-liputan kritis pada institusi pemerintah tertentu atau secara keseluruhan. Media kemudian hanya memberitakan hal-hal positif, tetapi abai pada fakta-fakta lain yang negatif.

Bahkan, ada perusahaan media yang menjadi corong merdu buat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Media seperti ini memberitakan program pemerintah sebagai semata-mata fakta yang wangi, tanpa memberi ruang untuk pengawasan dan kritik.

Sementara itu tingkat profesionalisme jurnalis perlu diasah terus. Tahun 2025 menurut catatan Dewan Pers, ada 1.166 aduan terkait berita. Mayoritas aduan adalah soal cover both sides (keberimbangan berita), judul yang click bait, penggunaan foto tanpa izin, serta ujaran kebencian. Tingginya aduan berita adalah indikasi profesionalisme jurnalis masih perlu ditingkatkan.

Bidang Pendidikan AJI Indonesia memiliki program meningkatkan kapasitas profesional kepada anggota AJI dengan membuka kelas jurnalisme daring per bulan. Materi yang diberikan terkait dengan masalah-masalah yang kerap muncul ketika liputan. Mulai materi bagaimana wawancara narasumber, membuat lead berita sampai materi lanjut seperti apa itu jurnalisme konstruktif.

Selain kelas jurnalisme yang khusus untuk anggota, AJI Indonesia juga melakukan berbagai pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan profesionalitas jurnalis. Kegiatan ini terbuka untuk semua jurnalis, termasuk anggota AJI sendiri. Tentu lewat seleksi dan pertimbangan pemerataan untuk banyak wilayah.

Beberapa pelatihan dan beasiswa yang diselenggarakan pada tahun 2025 adalah Liputan Investigasi untuk Jurnalis di Sulawesi, Pelatihan Kesadaran Publik untuk Imunisasi, Pelatihan Keamanan Digital, Pelatihan Melaporkan Isu Bisnis dan HAM, dan beberapa pelatihan lainnya.

A. Uji Kompetensi Jurnalis

Politik efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo berimbas pada pengurangan anggaran Dewan Pers untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ). Jumlah peserta UKJ yang dibiayai Dewan Pers berkurang tajam, dari semula 1.500-an (2024) orang menjadi hanya 250-an orang (2025). Dan kabarnya untuk tahun 2026, tidak ada lagi dukungan anggaran negara untuk Uji Kompetensi Jurnalis.

Padahal, UKJ merupakan agenda komunitas pers untuk menjawab problem profesionalisme. Uji Kompetensi adalah salah satu cara untuk meningkatkan ketaatan jurnalis pada kode etik jurnalistik.

AJI Indonesia sebagai salah satu konstituen di Dewan Pers, tidak menyerah dengan tekanan politik anggaran pemerintahan Presiden Prabowo. Selain mengikuti UKJ yang diselenggarakan Dewan Pers, AJI menyelenggarakan empat UKJ secara mandiri. UKJ bersama Dewan Pers, dilakukan dua kali pada tahun 2025 yaitu di bulan Mei dan Desember 2025. Sementara empat UKJ mandiri diselenggarakan di AJI Kota Jember (Juni 2025), AJI Kota Bengkulu (Juli 2025), AJI Kota Yogyakarta (November 2025) dan AJI Kota Batam (Desember 2025).

B. SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Jurnalis

Bidang Gender, Anak, dan Kelompok Marjinal bersama Satuan Tugas Anti-Kekerasan Seksual AJI Indonesia pada tahun 2025, fokus pada penyusunan kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi kekerasan seksual yang berada dalam lingkup jurnalistik. AJI memandang perlindungan ini sebagai bagian integral dari komitmen lembaga pers terhadap keadilan gender.

Pada Agustus 2025, atas dukungan International Media Support dan European Union, AJI Indonesia menyusun kertas kebijakan tentang mekanisme perlindungan pelapor kekerasan seksual di media massa. <https://aji.or.id/data/kertas-kebijakan-mekanisme-perlindungan-pelapor-kekerasan-seksual-di-media-massa>

Kertas kebijakan ini bertujuan mendorong perusahaan pers menyusun prosedur operasional standar atau SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi jurnalis. SOP akan menjadi landasan, memberikan kejelasan dan kepastian bagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan seksual.

AJI melihat sejumlah persoalan yakni lemahnya perlindungan terhadap pelapor dan korban kekerasan seksual di lingkungan media massa. Dokumen ini bagian dari pentingnya menciptakan ekosistem kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, serta memperkuat mekanisme penanganan kasus secara adil, transparan, dan berpihak pada korban.

Kertas kebijakan ini menegaskan bahwa pelaporan kekerasan seksual bukanlah bentuk pembangkangan, tetapi sebuah langkah penting menuju ruang kerja yang lebih adil dan setara. AJI Indonesia mendesak semua kalangan di industri media tidak mengabaikan pelapor dan korban, menangani kasus hingga menghasilkan putusan yang mendukung keadilan untuk korban. Perlindungan pelapor menjadi bagian dari komitmen institusi pers terhadap keadilan gender dan pemenuhan prinsip hak asasi manusia.

Sepanjang September hingga November 2025, AJI Indonesia bekerja sama dengan IMS dan Uni Eropa mendukung media massa yang menyusun prosedur operasional standar atau SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ada 40 media massa yang mendaftar dalam penyusunan SOP tersebut.

Tim AJI menyeleksi dan menetapkan enam media yang mendapatkan pendampingan menyusun SOP yakni The Conversation Indonesia, Harian Jogja, Tribun Jambi, Harian Mercusuar, Inside Lombok, dan Koreksi.org. <https://aji.or.id/informasi/rekrutmen-terbuka-fellowship-penyusunan-sop-kekerasan-seksual-di-media>

Selain itu, AJI juga aktif mendorong peningkatan kualitas pemberitaan dan kesadaran publik terkait kekerasan seksual. Salah satunya, terlibat dalam kampanye Peringatan 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 2025. Kampanye ini berlangsung secara serentak di seluruh dunia mulai dari 25 November hingga 10 Desember. AJI Indonesia juga berkolaborasi dengan Komnas Perempuan menggelar workshop dan lomba karya jurnalistik bertema Femisida. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman jurnalis dalam meliput kekerasan terparah terhadap perempuan dengan etika dan perspektif korban.

C. Pemberitaan yang Tidak Adil pada Minoritas Gender dan Seksual

AJI menaruh perhatian terhadap pemberitaan yang tidak adil terhadap minoritas gender dan seksual. Sejak 2016 hingga saat ini, serangan terhadap minoritas LGBTIQ masih menguat. Pobia LGBTIQ yang berujung pada diskriminasi terhadap LGBTIQ melalui pemberitaan media massa masih muncul. AJI mendesak sejumlah media massa tidak diskriminatif dalam memberitakan setiap individu dengan ragam identitas gender dan seksual karena semakin menebalkan stigma dan kebencian.

Di awal tahun dan akhir tahun, Bidang Gender menemukan pemberitaan yang mengabaikan Kode Etik Jurnalistik. Pada Januari, AJI memantau belasan media online yang memberitakan perceraian penyanyi Sherina Munaf dan suaminya, Baskara Mahendra. Pemberitaan yang bersifat opini itu menghubungkan perceraian Sherina dengan cuitannya di twitter atau X tentang dukungan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender atau LGBT. Berita lainnya juga menyinggung soal orientasi seksual Sherina dan Baskara, yang semestinya bersifat privat tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik.

Pemberitaan yang dihubungkan dengan orientasi seksual tidak menghormati keberagaman identitas gender, mengabaikan pentingnya inklusivitas terhadap kelompok minoritas berbasis identitas gender. Pemberitaan seperti itu semakin mempertebal stigma terhadap kelompok minoritas gender dan seksual yang berujung pada perlakuan diskriminatif. <https://aji.or.id/informasi/berita-perceraian-sherina-singgung-lgbt-aji-hentikan-sensasionalisme-dan-pengabaian-kode>

Dari belasan pemberitaan media massa yang dipantau, ada kecenderungan mencampurkan opini dan fakta. Media juga tidak konfirmasi dengan narasumber karena hanya menyadur dari sumber di media sosial. Bahkan, hanya dari komentar-komentar warganet di akun anonim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai kode etik jurnalistik.

Pada November, AJI memantau sejumlah pemberitaan media daring tentang Sister Hong Lombok yang viral belakangan ini. Pemberitaan itu cenderung diskriminatif terhadap orang dengan ragam orientasi seksual dan identitas gender. Menyebut identitas gender seseorang sebagai penyimpangan tidak berbasis pada bukti ilmiah dan mengabaikan prinsip universal hak asasi manusia atau HAM. Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan, termasuk jenis kelamin atau status lainnya.

AJI Indonesia melihat pemberitaan itu berpotensi meningkatkan ancaman kekerasan berbasis gender dan kekerasan berbasis gender online atau KBGO terhadap LGBTIQ di Indonesia. Pemberitaan itu mengabaikan Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman yang dikeluarkan Dewan Pers.

Sebagian media massa menggunakan kutipan narasumber dan judul yang berisi narasi kebencian, sensasional, clickbait dengan judul bombastis, dan menyerang kelompok minoritas berbasis identitas gender minoritas. Selain itu, pemberitaan menyinggung orientasi seksual Sister Hong Lombok, yang semestinya bersifat privat yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik. Lihat tautan berikut:

<https://aji.or.id/informasi/aji-desak-media-massa-tidak-diskriminatif-terhadap-minoritas-gender-dan-seksual-di-lombok>

D. Isu Anak dan Krisis Iklim

AJI bersama UNICEF Indonesia menggelar serangkaian kegiatan workshop, pelatihan, fellowship, dan penghargaan karya jurnalistik terbaik bertema anak dan krisis iklim. Topik tahun 2025 menekankan bahwa krisis iklim bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman langsung terhadap hak-hak anak, termasuk hak mereka atas kesehatan, gizi, air dan sanitasi, pendidikan, dan perlindungan. Penghargaan AJI-UNICEF telah berlangsung selama 10 tahun, diluncurkan pada tahun 2015 untuk membina dan memberikan penghargaan kepada jurnalis yang berkomitmen dalam meliput isu-isu yang berdampak pada anak-anak secara etis, akurat, dan berintegritas.

Karya-karya jurnalistik terbaik tentang anak tersebut kemudian dibukukan. Buku ini merekam kondisi anak Indonesia di tengah krisis iklim dan maraknya kekerasan. Lewat liputan mendalam, para jurnalis menghadirkan analisis dan kisah nyata yang diharapkan mampu membuka mata banyak pihak. Berikut tautan buku ini:

<https://aji.or.id/data/dampak-krisis-iklim-hingga-kekerasan-pada-anak-kompilasi-karya-jurnalistik-terbaik-tentang>

